

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002).
- Ali, Faried. *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*, (Bandung: Refika Aditama, 2012).
- Atmasamita, Romli. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra aditya Bakti, 1997).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Gadjong, Agus Salim Andi. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007).
- Gultom, Syawal. *Pengantar, dalam Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).
- Higgins, Rosalyn. *Problems and Proces: International Law and How We Use It*, Volume 1, (Oxford: Clarendon Press, 1994).
- Kansil, C. S. T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-13. (Jakarta: Kencana, 2017).
- Metrokusumi, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Nazmi, Didi. *Konsepsi Negara Hukum*. (Padang: Angkasa Raya, 1992).

- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan ke-4. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Otto, Roland. *Targeted Killings and International Law: With Special Regard to Human Rights and International Humanitarian Law*. (New York: Springer, 2011).
- Parthiana, I Wayan. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, (Bandung: Yarma Widya, 2003).
- Pratiwi, Cekli Setya, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, dan Christina Yulita Purbawati, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016).
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*. (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).
- Samantho, Yanuana Ahmad. *Sejarah ISIS dan Illuminati*, (Jakarta: PT Ufuk Publishing House, 2014).
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: C.V Armico, 1985).
- Setiono. *Rule of Law (supremasi hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004).
- Shelton, Dinah. *Remedies in International Human Rights Law*, (New York: Oxford University Press, 1999).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006).
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011).
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudaro d/a Fakultas Hukum UNDIP, 1990).
- Sujatmoko, Andrey. *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, (Jakarta: Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005).
- Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar. *Hukum Internasional Kontemporer*. (Bandung: PT Rafika Aditama, 2006).

Wiktorowicz, Quintan. *Group A Genealogy of Radical Islam*, (Tennessee: Routledge, 2005).

Zainal, Asikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156)*.

_____. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)*.

_____. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63)*.

_____. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52)*.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92)*.

C. Jurnal, Makalah, dan Skripsi

Andaryadi, Sandi. “Analisis Terhadap Keputusan Pencegahan dan Penangkalan Keimigrasian di Indonesia”. *Tesis*. (Depok: Universitas Indonesia, 2008).

Anggita, Kevin Dariola. “Status Hukum Warga Negara yang Berkewarganegaraan Ganda Menurut Hukum Kewarganegaraan Indonesia”. *Skripsi*. (Jember: Universitas Jember, 2018).

Buana, Mizra Satria. “Hubungan Tarik-menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice)

Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi”. *Tesis*. (Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010).

Michael Hoffman. “Terrorists are Unlawful Belligerents, Not Unlawful Combatants: A Distinction with Implications for the Future of International Humanitarian Law”. *Case Western Reserve Journal of International Law*, Vol. 34 Issue 2, 2002.

Khabiburrohman, Malik. “Teori Locus Delicti Perspektif Imam Abu Hanifah”. *Walisono Institutional Repository*, 2010.

Kholis, Nur. “Asas Non Diskriminasi dalam Contempt of Court”. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 26 No. 2, 2019.

Lamandasa, Raimond Flora. *Penegakan Hukum*, dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011).

Muttaqim, “Foreign Terrorists Fighters (FTF) Dan Langkah Administrasi Negara Terhadap Keadaan Tanpa Kewarganegaraan”, *Indonesian State Law Review*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2020.

Nasar, Fuad. “Gerakan ISIS Ancaman Ideologi dan Keagamaan NKRI”. *Makalah Islam*. 2014.
<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/gerakan-isis-ancaman-ideologi-dan-keagamaan-nkri>. 16 Februari 2020.

Samu, Kifly Arafat. “Status Hukum Warga Negara Indonesia yang Terlibat dalam Organisasi Teroris Internasional”. *Jurnal Lex Et Societatis*. Volume VI No. 10 Tahun 2018.

Sitompul, Brivan. Skripsi: *Penerapan Asas Nasional Aktif Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan No.267/Pid.Sus/2017/PN Pya)*, (Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2018).

Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik”, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Issue 3, 2019.

Triatmodjo, Marsudi. “Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Internasional”, *Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM*, No. 33/X/99 Tahun 1999.

Wijayanta, Tata. “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14 No. 2 Mei 2014.

D. Artikel Internet

Ansyari, Syahrul. "Motif WNI Gabung ISIS: Hidup Bergaya Bak Bintang Lima", <https://www.viva.co.id/berita/nasional/777037-motifwni-gabung-isis-hidup-bergaya-bak-bintanglima>. 12 Desember 2020.

Australian National Security. "Islamic State". <https://www.nationalsecurity.gov.au/Listedterroristorganisations/Pages/IslamicState.aspx>. 16 Februari 2020.

Hendartyo, Muhammad dan Arkhelaus Wisnu Triyogo. "BNPT Minta Deportasi WNI dari Turki dengan Penerbangan Langsung", <https://nasional.tempo.co/read/1094375/bnptmintadeportasi-wni-dari-turki-dengan-penerbanganlangsung/full&view=ok>. 22 Desember 2020.

Mashabi, Sania. "Bantah Moeldoko, Mahfud Tegaskan Kewarganegaraan WNI Eks ISIS Belum Dicabut", Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/13/14134761/bantah-moeldoko-mahfud-tegaskan-kewarganegaraan-wni-eks-isis-belum-dicabut>. 17 Agustus 2020.

Setyawan, Ferl Agus. "Menyoal Keputusan Jokowi soal Status 689 WNI Eks ISIS". CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200213174142-20-474376/menyoal-keputusan-jokowi-soal-status-689-wni-eks-isis>. 16 Februari 2020.

E. Wawancara

Peneliti. Wawancara dengan Bapak Yogie Indra Kurniawan, S.H. dan Bapak M. Afif Imadudin, S.H. selaku bagian Hukum dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), (Sentul: Kantor Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 14 Desember 2020).

Peneliti. Wawancara dengan Bapak Drs. Teddy Nurcahyawan, S.H., M.A., selaku Dosen dan Ahli Hukum, (Jakarta: Wawancara via Telepon, 26 November 2020).

Peneliti. Wawancara dengan Bapak Dr. H. Aji Wibowo, S.H., M.H., selaku Dosen, Asisten Wakil Dekan I dan Ketua Bagian Hukum Internasional Publik FH Trisakti, (Jakarta: Wawancara via Zoom, 10 Desember 2020).